

## Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani di Kelompok Tani Sedyo Utomo Padukuhan Widoro Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul

Joko Raharjo

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia.

Informasi Artikel: Submit: Maret 2022, Revisi: April 2022, Diterima: Mei 2022

### Abstract:

The farmer card program as a government policy has been running massively at the end of 2020 in the Bangunharjo Village area. The purpose of this study was to analyze the implementation of the farmer card program policy and analyze the problems with the implementation of the farmer card program policy in the Sedyo Utomo Farmers Group, Widoro Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon. The method used is a qualitative method with a case study approach and the type of research is explanatory. The results of the research on the implementation of the farmer card program policy at the Sedyo Utomo Farmer Group went well, the method of redemption of fertilizers was carried out collectively, farmer groups had an important role in the availability of subsidized fertilizers. Supporting factors, the active role of BPP Kapanewon Sewon which provides fast information, the convenience of the BRI Bank Kepek Branch, providing farmer card facilities, good cooperation between farmer groups, farmers and Dukuh, full trust from all farmers. Inhibiting factors are transportation of farmer groups that do not yet exist, cost and distance from home far from Complete Fertilizer Kiosk (KPL), transportation is borne by farmers, many farmers are elderly.

**Keywords:** implementation, policy, farmer card, subsidized fertilizer.

### Abstrak:

Program kartu tani menjadi kebijakan pemerintah sudah berjalan secara masif dilaksanakan akhir tahun 2020 di wilayah Kalurahan Bangunharjo. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan program kartu tani dan menganalisis permasalahan terhadap implementasi kebijakan program kartu tani di Kelompok Tani Sedyo Utomo Padukuhan Widoro Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon. Metode yang digunakan metode kualitatif pendekatan studi kasus dan jenis penelitian eksploratori. Adapun hasil penelitian implementasi kebijakan program kartu tani di Kelompok Tani Sedyo Utomo berjalan baik, cara pennebusan pupuk dilaksanakan secara kolektif, kelompok tani punya peran penting dalam ketersediaan pupuk bersubsidi. Faktor pendukung, peran aktif BPP Kapanewon Sewon yang memberikan informasi cepat, Kemudahan Bank BRI Cabang Kepek fasilitas penyedia kartu tani, kerjasama baik antara kelompok tani, petani dan Dukuh, Kepercayaan penuh dari semua petani. Faktor Penghambat yaitu Transportasi kelompok tani yang belum ada, biaya dan jarak rumah jauh dari Kios Pupuk Lengkap (KPL), Transportasi dibebankan kepada petani, banyak petani yang sudah lansia.

**Kata kunci:** implemetasi, kebijakan, kartu tani, pupuk bersubsidi.

\*Corresponding author: Joko Raharjo

E-mail address: [jokoraharjo1208@gmail.com](mailto:jokoraharjo1208@gmail.com)

The content of this website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license. Creative Commons License.

## PENDAHULUAN

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kawasan pertanian yang mempunyai lahan pertanian luas, hal ini menjadikan kepedulian Pemerintah Bantul untuk selalu memprioritaskan berbagai program dalam sektor pertanian yang berpihak bagi petani. Wilayah Bantul yang terdiri dari tujuh puluh lima Kalurahan, salah satunya Kalurahan Bangunharjo mempunyai lahan pertanian yang luas, khususnya di Padukuhan Widoro. Tahun 2022 kebijakan baru dari pemerintah pusat terhadap anggaran dana desa yang

mewajibkan seluruh desa untuk menganggarkan kegiatan 20% bagi ketahanan pangan memberikan angin segar untuk membantu mensejahterakan petani.

Pembangunan salah satunya di bidang pembangunan pertanian yang merupakan sektor sangat penting dan perlu untuk selalu diprioritaskan. Peningkatan kesejahteraan diharapkan mampu tumbuh melalui pembangunan pertanian yakni sebagai motivasi untuk meningkatkan hasil produksi dan kemajuan petani. Bentuk dukungan dari pemerintah guna menyediakan faktor kemudahan dalam berusaha tani adalah adanya kemudahan ketersediaan dalam membeli pupuk bersubsidi bagi petani. Problem pada pupuk, problem benih dan harga menjadi permasalahan klasik yang tidak bisa lepas dari kesejahteraan petani (Dahiri, 2018). Kebijakan subsidi pupuk dalam menyediakan pupuk bagi petani adalah sebuah hal yang selalu mengalami transisi konseptual. Pencapaian progres efektivitas dan efisiensi dalam proses mendistribusikan pupuk bersubsidi ini dilakukan secara bertahap sehingga mampu mencapai target yang diharapkan. Upaya dalam mengantisipasi dan mengatasi adanya permasalahan dalam kebijakan penggunaan kartu tani untuk penebusan pupuk bersubsidi yang ada selama ini tentunya menggunakan bantuan teknologi dan perluasan mitra.

Peran penting dari pemerintah yang diharapkan untuk kelangsungan hidup petani, oleh karena itu selain aturan baru di tahun 2022 pemerintah sebelumnya telah mencanangkan Program Kartu Tani yang dibuat dan dikeluarkan kebijakan penggunaan kartu tani untuk mengelola penyaluran pupuk bersubsidi yang diwajibkan bagi petani. Kebijakan hingga kini yang dikeluarkan oleh pemerintah ternyata belum sepenuhnya berjalan lancar dan masih ada beberapa kendala dilapangan terkait penerapan penggunaan kartu tani tersebut. Kabupaten Bantul mulai pendataan di tahun 2017 dengan menggandeng kelompok tani yang tersebar di Desa-Desa untuk membantu dalam hal pendataan petani setempat.

Pemerintah Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengeluarkan kebijakan baru terkait sektor pertanian sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satunya yaitu menghadirkan kebijakan program Kartu Tani sebagai alat guna memaksimalkan dalam melaksanakan program baru kebijakan pupuk bersubsidi bagi masyarakat petani. Kartu tani yang digunakan dalam penebusan pupuk bersubsidi ini dilatarbelakangi adanya permasalahan data pertanian Indonesia seperti belum akuratnya data banyaknya petani, lahan garap dan jumlah yang dibutuhkan pangan nasional.

Pengamanan pupuk bersubsidi inilah juga yang menjadikan latar belakang munculnya program baru.

Petani di Kelompok Sedyo Utomo Padukuhan Widoro sebenarnya dalam mempraktekkan penggunaan kartu tani ini jelas memberikan keuntungan baik bagi petani maupun kelompok, khususnya dalam hal pembelian yang diperoleh dikios penyedia pupuk lengkap (KPL) Sarana Tani Kalurahan Bangunharjo. Penelitian di awal ada kaitannya dengan petani yang menggunakan kartu tani dalam melakukan pembelian pupuk bersubsidi di kelompok Tani Sedyo Utomo Padukuhan Widoro masih belum maksimal disebabkan oleh informasi Kartu Tani yang tersampaikan tidak secara menyeluruh ke petani. Kemudian teknis penebusan pupuk di Padukuhan Widoro dilakukan secara kolektif oleh kelompok tani Sedyo Utomo berdasarkan dari hasil rapat semua petani di Padukuhan Widoro. Pendistribusian Kartu Tani ke sasaran memang cukup lama prosesnya sehingga menjadikan hambatan bagi petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Adapun kebijakan pembelian pupuk bersubsidi bisa dilayani dengan membawa fotocopy KK dan mengisi form penebusan yang disediakan oleh Kios serta syaratnya harus masuk dalam E-RDCK. Sebagai syarat wajib dalam hal data administrasi pendaftaran kartu tani masih juga mengalami permasalahan dalam menyusun data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDCK).

Masa tanam ketiga di akhir tahun 2020 barulah secara masif penggunaan kartu tani bisa diterapkan di beberapa kios penyedia pupuk bersubsidi khususnya di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul. Penerapan di awal masih banyak kekurangan-kekurangan yang imbasnya terasa kepada petani. Beberapa nama petani belum menerima kartu tani, penerima kartu tani tidak bisa menggunakan karena data jatah pupuk masih 0 ( nol) atau tidak ada kuota, petani yang belum terdata, harga pupuk mengalami kenaikan harga , petani mengalami kesulitan dalam jarak tempuh menuju kios (terlalu jauh) dibandingkan membeli di kelompok tani, kelompok tani sudah tidak mendapatkan pemasukkan kas dari pupuk bersubsidi yang dulu dikelola.

Berbagai alasan yang sudah dijabarkan tersebut, oleh sebab itu peneliti tergerak untuk melakukan penelitian sejauh mana implementasi di lapangan dalam menjalankan kebijakan Pemerintah berhubungan dengan pelaksanaan program kartu tani di kelompok Tani Sedyo Utomo Padukuhan Widoro Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon. Adanya kebijakan program kartu tani ini diharapkan menjadikan modal awal sebagai peluang yang besar bagi petani maupun kelompok tani Sedyo Utomo guna memperoleh

kemudahan dalam penebusan pupuk program pemerintah sebagai tambahan penunjang pertanian dengan harga yang sesuai dan lebih terjangkau walaupun dikelola oleh kelompok tani serta memberikan kemudahan bagi petani-petani yang sudah lansia dalam melakukan transaksi penebusan pupuk dengan kartu tani. Harapan lainnya adalah petani memiliki keinginan yang kuat dalam memajukan Kelompok Tani Sedyo Utomo supaya lebih maju dan selalu berpihak pada petani. Pemerintah juga selalu berupaya dalam membantu meningkatkan dan mewujudkan cita-cita petani dalam mencapai kesejahteraan.

### **Implementasi**

Implementasi merupakan sebuah tindakan atau kegiatan yang sudah menjadi rencana dan sudah tersusun berdasarkan pertimbangan secara matang dan juga terperinci. Pelaksanaan implementasi ini didasarkan pada sebuah perencanaan yang bisanya sudah dianggap baik dan sempurna. Implementasi juga bisa diartikan sebagai bagian muara dari sebuah aktivitas, tindakan atau juga bisa dikatakan adanya mekanisme dari sebuah sistem, tidak hanya aktivitas, akan tetapi suatu kegiatan yang sudah direncanakan sebagai wujud dalam memperjuangkan pencapaian tujuan kegiatan (Nurdin Usman, 2002).

Implementasi dilaksanakan ketika sebuah rencana yang menjadi pertimbangan khusus sudah dirasa paling sempurna dan dianggap sudah final. Pelaksanaan merupakan kata lain arti dari implementasi bermula dari kata bahasa Inggris Implement artinya adalah melaksanakan (Mulyasa, 2013).

Bisa ditarik kesimpulan bahwa arti dari sebuah kata implementasi adalah sebuah hal yang ada hubungannya dengan suatu kegiatan perencanaan yang sudah ada, tidak hanya sebuah aktivitas dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berpedoman pada nilai-nilai kebijakan dasar atau norma sebagai upaya dalam mewujudkan sebuah tujuan tertentu. Dengan demikian implementasi selalu dipengaruhi oleh suatu objek berikutnya yakni sebuah kurikulum dan implementasi tidak bisa berdiri sendiri. Sedangkan sebuah implementasi kurikulum adalah tahapan pelaksanaan gagasan pandangan, sebuah kegiatan yang belum pernah ada dengan adanya keinginan pihak lain akan bisa dengan baik menerima dan juga mau menjalankan sebuah perbaikan perbedaan terhadap sebuah proses keilmuan dan tentunya ada hasil yang menjadi target.

### **Faktor-Faktor Pengaruh Implementasi**

Ada dua variabel yang menjadikan sebuah keberhasilan dari implementasi, yakni adanya isi kebijakan (*content of policy*) dan adanya lingkungan implementasi (*context of implementation*). Dari dua variabel masih dibagi berbagai hal, adapun variabel isi kebijakan mencakup (Merile dan Grindle, 2002) 1. Adanya kepentingan kelompok target yang termuat pada isi kebijakan 2. Macam manfaat diperoleh objek grup 3. Adanya perubahan sebagai upaya dari suatu kebijakan 4. Adanya Ketepatan dalam meletakkan sebuah program. Beberapa point dari variabel lingkungan kebijakan yakni 1. adanya kekuasaan yang menjadi pertimbangan apakah besar atau kecil, 2. Mempunyai sebuah kepentingan juga cara dari semua pelaku pada implementasi kebijakan, 3. Adanya Karakteristik dan adanya juga kelompok tertentu penguasa pada saat itu, 4. Di dalam kelompok sasaran mempunyai tingkat kepatuhan dan responsivitas.

Implementasi mempunyai tugas sebagai alat untuk melakukan pembangunan jaringan yang akhirnya adalah keberhasilan kebijakan bisa dilaksanakan lewat kegiatan dinas pemerintah bersama banyak kolega dengan wewenang dan kepentingan masing-masing. Berdasarkan karakteristik yang beragam dari kebijakan-kebijakan diantaranya yaitu adanya jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsesus yang ada dalam tujuan antara pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah serta dalam proses berlangsungnya implementasi tersebut. (Meter et al., 1975)

Karakteristik yang paling penting dari unsur perubahan ada dua hal 1. Implementasi yang memang akan dipengaruhi oleh kebijakan yang sejauh mana akan menjadi sebuah penyimpangan dari adanya kebijakan terdahulu. Dalam hal ini adanya perubahan *inkremental* akan cenderung mengakibatkan sebuah respon baik atau positif dibandingkan pada perubahan-perubahan secara drastis (rasional) , misalnya pada contoh yang disampaikan sebelumnya adanya perubahan inkremental dengan dasar dari pembuatan keputusan secara inkremental yang merupakan pengulangan dan diarahkan lebih banyak lagi kepada adanya perbaikan terhadap kekurangan sosial yang ada sekarang daripada menunjukkan tujuan sosial dari masa yang akan datang. Jelas berbanding terbalik adanya perbedaan pergantian yang berpatokan pada keputusan rasional dengan orientasi lebih pada pembaharuan yang signifikan dan mendasar. Hal ini menyebabkan resiko peluang konflik atau masalah maupun ketidakpastian karena tidak ada mufakat antara pelaku pembuat kebijakan begitu besar, 2. Secara proses implementasi pasti akan dipengaruhi oleh sejumlah perubahan kelompok organisasi yang dibutuhkan. Apabila lembaga pelaksana tidak

diwajibkan melakukan progenesis secara tiba-tiba atau drastis sangat mungkin implementasi ini bisa berjalan secara efektif. Peningkatan tuntutan yang terjadi terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administrasi muncul dikarenakan program-program sosial banyak yang gagal.

### **Implementasi Kebijakan**

Model implementasi kebijakan "*integrated implementation model*", jalannya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga variabel antara lain (S C Winter, 2003)

1. Perilaku Hubungan Antar Organisasi (*Behavior Relationship Between*)

Perilaku hubungan antar organisasi ini mencakup dua hal yaitu komitmen dan koordinasi, dimana komitmen merupakan sebuah hasil musyawarah dengan lembaga terkait dengan menjaga keamanan organisasi dan jaringan yang ada antar organisasi dalam kaitannya pelaksanaan program. Tujuan dari hal tersebut untuk menjaga kemungkinan timbulnya rasa egois diantara organisasi pelaksana program yang bisa mempengaruhi hasil akhir sebuah implementasi. Disamping itu, begitu pentingnya tataran koordinasi pola hubungan diantara organisasi dan sangat ada dampaknya terhadap penentuan strategi sebuah implementasi. Kebijakan publik bisa diatur dan dapat diterapkan lewat dua atau lebih organisasi.

2. Perilaku Aparat Birokrasi Tingkat Bawah (*Street Level Bureaucratic Behavior*)

Perilaku aparat birokrasi tingkat bawah ini mempunyai maksud sebagai kemampuan dalam menjalankan dan melaksanakan banyak program sebagai keputusan urgen dengan mempergunakan pengaruh lebih dominan diluar kebijakan formal (*diskresi*). Sebuah perilaku implementasi kebijakan secara sistematis kadangkala bisa menyimpang dari tugas yang ada dengan kebijakan selaku pelaksanaannya. (Lipsky, 1980) Hal yang utama dalam implementasi yakni hubungan antara masyarakat dalam menyampaikan kebijakan. Sehingga birokrasi level bawah yang menjadi peran utama dalam implementasi kebijakan publik, dan juga kinerjanya berdasarkan pada standar program yang ada hubungannya dengan aktivitasnya.

3. Perilaku Kelompok Sasaran (*Target Grup Behavior*)

Perilaku kelompok sasaran ini memiliki respon baik positif dan negatif masyarakat di dalam kaitannya dukungan atau menolak kebijakan. Dalam implementasi kebijakan publik merupakan sejumlah orang, lembaga atau individu yang menerima

jasa sebagai aktor tidak hanya dari dampak kebijakan akan tetapi dari sisi untuk mempengaruhi sebuah proses implementasi program melalui suatu aktivitas yang positif dan negatif (S C Winter, 2003).

### **Kebijakan Publik**

Serangkaian aktivitas yang sudah diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam sebuah lingkungan tertentu yang mana ada kendala-kendala dan kesempatan terhadap implementasi usulan kebijakan tersebut dalam rangka untuk mencapai sebuah tujuan tertentu adalah arti dari kebijakan. (Leo Agustino, 2008) Bagian penting dari definisi kebijakan harus menunjukkan dimana ide kebijakan melibatkan sebuah perilaku yang mempunyai maksud dan tujuan, karena mau tidak mau kebijakan haruslah memperlihatkan apa yang telah dikerjakan sesuai fakta daripada apa yang menjadi usulan dalam beberapa aktivitas pada suatu permasalahan.

Kebijakan adalah *"a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern"* (beberapa tindakan yang saling berhubungan dengan adanya tujuan tertentu yang diikuti dan dilakukan oleh seorang pelaksana atau sekelompok pelaksana sebagai upaya untuk pemecahan masalah tertentu). (M.Irfan Islamy, 2009)

Arti dari kebijakan publik adalah sebuah problem atau aktivitas yang dilakukan dengan sengaja yang ditetapkan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku sebagai upaya memecahkan masalah tersebut. (Anderson, 2012).

"Kebijakan publik artinya sebuah pilihan akan dilakukan atau tidak dilakukan", melakukan akan tetapi tidak dilaksanakan sesuai dengan kebijakan. Mempunyai arti bahwa pembuat kebijakan bisa menjalankan keputusan sebagai sebuah kegiatan yang mempunyai kebijakan dan arah goal tujuan dengan memenuhi segala aktivitas dari pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah, tidak sekedar tulisan dan lisan yang diharapkan pemerintah atau pegawainya. Hal tersebut juga diartikan bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang bersifat nasional bahwa pemerintah tidak menjalankannya. (Tahir, 2011)

Fungsi adanya kebijakan publik sebagai sarana untuk mengatur, pengelola dan juga penyelesaian dari tugas berbagai kehumasan, permasalahan yang ada kaitannya dengan sumber daya dan kepentingan umum untuk dijalankan beriringan oleh pemerintah demi kepentingan yang lain. Dimana cara kerja melalui proses yang bertahap dan tentunya

saling berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas. Adapun proses itu antara lain adanya pengembangan kebijakan, pelaksanaan dan juga evaluasi untuk perbaikan. Tahapan tersebut satu dengan yang lain tidaklah dapat dipisahkan dan saling berpengaruh. Ketika ada tahapan pembangunan yang berjalan dengan lancar dan baik, akantetapi kebijakannya tidak dapat dilalui dengan maksimal. Proses pelaksanaan dan penilaian ini menjadi urgen yang digunakan sebagai alat ukur sebuah keberhasilan suatu kebijakan. (Mulyadi, 2016)

### **Teori Evaluasi Kebijakan**

Pengawasan dari sebuah kebijakan publik tidak bisa begitu saja dilepas, oleh karena itu selalu perlu untuk diawasi dan mekanisme yang dilakukan dalam pengawasan tersebut dinamakan “Evaluasi Kebijakan”. Biasanya evaluasi ini akan ditujukan sebagai bahan untuk penilaian seberapa efektifkah publik dalam upaya mempertanggungjawabkan kepada konstituenya. Seberapa jauh tujuan tersebut dicapai dan bisa berhasil. Evaluasi itu juga perlu dilakukan dengan tujuan bisa melihat antara harapan dengan realitas yang terjadi.

Berdasarkan yang dikemukakan Bingham dan Felbinger dalam Lester dan Stew bahwa evaluasi kebijakan dibagi menjadi empat macam yaitu : 1. Evaluasi proses lebih cenderung difokuskan pada bagaimana proses implementasi, 2. Evaluasi dampak dimana fokusnya terletak pada hasil dari sebuah kebijakan, 3. Evaluasi kebijakan dengan sifat penilaian hasil kebijakan dengan tujuan terencana pada sebuah kebijakan saat dilakukan perumusan., 4. Meta evaluasi sebagai introspeksi terhadap bermacam-macam dari penemuan penilaian kebijakan yang saling berhubungan.

Dari penjelasan diatas, pemahaman yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan sering dimaknai dengan evaluasi implementasi kebijakan dan atau evaluasi kebijakan atau evaluasi kinerja. Sedangkan di dalam evaluasi kebijakan publik ada empat lingkup yakni evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan.

Penentuan apakah sebuah kebijakan akan bisa berhasil atau tidaknya dilihat dari empat komponen yang disebutkan di atas tadi. Akantetapi di dalam konsep “evaluasi” itu sendiri akan selalu dipengaruhi pada konsep “kinerja “sehingga “kegiatan pasca” inilah yang menjadikan pemaknaan dari ketiga wilayah evaluasi kebijakan publik.

### **Program Kartu Tani**

Program Kartu Tani adalah suatu usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mensejahterakan para petani. Dengan program ini diharapkan dapat menyeleksi dan memilih petani mana yang berhak menerima subsidi dari pemerintah, sehingga konsep subsidi/ bantuan yang terjadi bukan lagi produknya tetapi siapa (orang/individu) yang berhak untuk mendapatkannya sehingga bisa memberikan kemudahan bagi petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi.

Program kartu tani diinisiasi oleh Kementerian Pertanian untuk mengefisienkan pendistribusian pupuk bersubsidi dengan tujuan hanya petani kecil yang menjadi sasaran pemberian subsidi/bantuan ini. Kartu tani dirancang secara khusus untuk petani kecil yang implementasinya dimulai di Pulau Jawa. Beberapa perbankan yang mempunyai peran penting pada implementasi program kartu tani di tingkat paling bawah atau sasaran, perbankan tersebut yang tergabung pada Himpunan Bank Negara (HIMBARA). Dimulai pada tahun 2018, tiga bank BUMN bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, yakni perbankan Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Provinsi Banten, Yogyakarta, dan Jawa Tengah, Bank Mandiri di Jawa Barat dan Bank Negara Indonesia (BNI) di Jawa Timur. Yang mana perbankan tersebutlah sangat membantu dalam penerbitan ATM khusus petani yang dipergunakan oleh petani sebagai alat menebus. Setelah diluncurkan pada 2016, aplikasi program kartu tani belum mampu menunjukkan kemajuan implementasi yang baik sebagaimana diharapkan (Hariani dan Ashari, 2019)

Kartu tani yang terintegrasi secara *daring*, pemerintah dapat memantau hasil produksi petani dan distribusi pupuk. Selain itu, petani akan mendapat kepastian pupuk bersubsidi, melatih menabung dan kemudahan menjual produknya. Kios pupuk mendapatkan tambahan penghasilan sebagai BRI-link, sedangkan pemerintah berupaya mendorong dan mensosialisasikan program ini.

Kuota pupuk bersubsidi yang berhak ditebus petani didasarkan pada luas lahan yang di input pada E-RDCK. Data tersebut diinput oleh penyuluh, kemudian bank menerbitkan kartu, dan selanjutnya petani menebus pupuk di kios yang ditunjuk sesuai e-RDCK. Kewajiban lain Koordinator Penyuluh dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) adalah mensosialisasikan kartu tani kepada petani dan kios distributor (Prabawati dan Mufidah, 2018). Kartu tani yang berbentuk ATM ini menjadi kewajiban dari perbankan untuk disalurkan kepada para petani yang terdaftar namanya, kemudian perbankan akan memberikannya kepada petani yang fungsinya kartu tani bisa dipergunakan untuk proses

penebusan pupuk bersubsidi di Kios Pupuk Lengkap sesuai dengan wilayah masing-masing yang mana penggesekan kartu tani ATM ini digesek melalui mesin EDC yang tersedia.

### **Petani**

Mata pencaharian dalam bentuk bercocok tanam merupakan arti dari kata Tani yang ada dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Adapun dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan adalah arti dari kata Program.

Definisi dari kata petani pastinya banyak dari akademisi sosial mengartikan yang beraneka ragam. Petani itu sendiri mempunyai banyak dimensi, yang menyebabkan muncul berbagai kalangan memberi pandangan arti sesuai dengan karakteristik yang dominan. Tiga ciri-ciri petani menurut Moore dalam bukunya *Social Origins of Dictatorship and Democracy and Peasant in the Making of the Modern World* (1966:243) yaitu subordinasi legal, kekhususan kultural, dan pemilikan de facto atas tanah. Seseorang yang bekerja guna memenuhi keperluan hidupnya dari kegiatan usaha pertanian, baik berupa kegiatan usaha pertanian pada bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai tani disebut petani akan tetapi petani tersebut mempunyai ciri-ciri : 1. rumah tangga petani artinya bahwa rumah tangga dalam masyarakat desa mempunyai dimensi dobel, 2. Seorang Tani yang menggantungkan dari usaha tani sebagai catatan bahwa petani mengolah tanah(lahan), 3. Mempunyai ciri khas kebudayaan yakni tradisional dan juga punya ciri tertentu atau khas, 4. Di dalam lingkup masyarakat posisi petani ini di bawah, dalam artian mereka “orang kecil” pada masyarakat di atas-desa (Sajogyo, 1999). Sedangkan yang dianggap sebagai “petani kecil” memiliki ciri-ciri: 1. Peningkatan dalam berusaha ini terjadi dalam tekanan penduduk setempat , 2. Keterbatasan dalam sumberdaya yang mengakibatkan terciptanya tingkat hidup yang bisa dikata rendah, 3. Ketergantungan kepada hasil produksi yang bersifat subsisten secara keseluruhan atau sebagian, dan 4. Masih ada kendala yang berhubungan dengan minimnya perolehan hak pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan pelayanan lainnya.(Sujito, 2013)

Karakteristik yang dimiliki sebagai seorang petani berbeda dengan profesi lain dikarenakan petani secara individu bisa diamati dari sebuah kebiasaan berbuat berkomunikasi dan berinteraksi yang dilihat dalam melakukan kebiasaan sehari-hari

kegiatan usaha tani. Perlindungan dan Pemberdayaan petani ada dalam undang-undang nomor 19 tahun 2013 pasal 1 ayat 3 yang mana berbunyi bahwa seorang petani itu adalah merupakan warga negara Indonesia perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan atau peternakan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan berlokasi di Kelompok Tani Sedyo Utomo Padukuhan Widoro Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul yang mana dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan Mei 2022. Metode yang digunakan metode kualitatif pendekatan secara studi kasus dengan jenis penelitian eksploratori dikarenakan penelitian ini diharapkan dapat mengungkap, menguraikan dan menjelaskan pemaknaan-pemaknaan melihat fenomena yang ada pada sebuah objek dari yang diteliti. Tujuan dari penelitian kualitatif untuk memahami sebuah kondisi suatu konteks sehingga bisa mendeskripsikan secara detail dan menyeluruh pada suatu konteks alami tentang kebenaran yang terjadi di lapangan studi (Nugrahani, 2014). Sehingga tujuan dari penelitian yang dilakukan ini untuk menganalisis sebuah pelaksanaan kebijakan program kartu tani dan juga menganalisis permasalahan-permasalahan yang muncul terhadap implementasi kebijakan di Kelompok Tani Sedyo Utomo Padukuhan Widoro Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon. Pemilihan lokasi dengan metode purposive dilakukan karena mampu memberikan gambaran yang bersifat khusus atas fenomena apa yang terjadi pada praktek dan jalannya program kartu tani yang terjadi di tempat penelitian. Sedangkan sampling dengan Metode snowball sampling digunakan dalam menentukan informan supaya narasumber terpilih adalah orang dengan benar-benar kompeten untuk menyampaikan hal-hal berkaitan dengan tema penelitian. Informan ditentukan berdasarkan kesesuaian dengan tujuan dan sasaran yang menjadi harapan dari penelitian ini. Pemilihan informan ini adalah komponen yang bisa memberikan informasi, mempresentasikan fenomena, aktivitas individu dan kelompok serta karakteristik dalam beragam objek penelitian. Informan juga sebagai implementor yang secara langsung maupun tidak langsung pada pelaksanaan kebijakan program kartu tani di BPP Kapanewon Sewon. Adapun narasumber berjumlah 20 yang terdiri dari komponen dari penyuluh BPP (Balai Penyuluh Pertanian) Kapanewon Sewon, Petugas administrasi kartu tani, pengurus Kelompok tani diwakili oleh ketua, petani di Padukuhan Widoro, Petugas Kios Pupuk Lengkap (KPL). Sumber data proses

pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut wawancara mendalam, observasi, catatan lapangan serta adanya dokumentasi. Ada dua sumber data yakni data primer dan sekunder, sumber data primer diperoleh dari proses wawancara yang mendalam, observasi, catatan lapang dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara diskusi terarah antara seorang narasumber dan peneliti berdasarkan dari apa yang sedang dilakukan penelitian (Gunawan, 2016). Pelaksanaan observasi menggunakan tipe partisipan sebagai pengamat karena adanya pembatasan diri dari peneliti agar tidak terlibat secara mendalam dalam aktivitas sumber yang diamati. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari dokumentasi yang berupa sumber-sumber literasi yang diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, buku, laporan, data statistik, arsip serta adanya publikasi media yang berhubungan dengan fokus penelitian. Analisis yang digunakan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan model analisis data interaktif dari Miles dan Huberman. Model Implementasi ini digunakan pada pembahasan Problematika implementasi kebijakan program kartu tani (Edward III, 1980) dengan beberapa poin yakni adanya komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Tahapan langkah dalam mengolah data sebagai berikut :

1. Menulis dan mengecek data yang sudah ada
2. Mengkategorikan semua data dalam pemberian kode data yang disesuaikan pada karakteristik dan pembuatan pedoman peneliti sebelumnya.
3. Pengolahan dan Data direduksi dengan cara mengamati hubungan antar data-data yang ada, hubungan diantara banyak informasi komponen narasumber, hubungan semua fenomena penemuan dengan berbagai catatan atas fenomena yang sudah ada dan berlalu yang ada hubungannya dengan implementasi kebijakan kartu tani.
4. Mendeskripsikan dari olahan data dengan cara membuat sebuah narasi, dan pola serta bentuk penyajiannya lain harus secara keseluruhan dan sistematis.
5. Penarikan secara keseluruhan menjadi sebuah kesimpulan dari hasil analisis data yang sudah dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Program Kebijakan Kartu Tani**

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran serta dari keterlibatan dan peran aktif dari beberapa pihak diantaranya pengurus kelompok tani, ketua RT dimasing-masing wilayah, dan Dukuh dalam mensosialisasikan tentang informasi berkaitan dengan program kebijakan terbaru pembelian pupuk bagi petani menggunakan ATM kartu tani. Pelaksanaan dalam pengajuan pembuatan Kartu Tani di Kelompok Tani Sedyo Utomo Padukuhan Widoro Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon sudah berdasarkan dari hasil arahan dan pedoman pada saat mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh BPP Kapanewon Sewon. Prosedur apabila dalam perjalanan penerapan kebijakan kartu tani ini ada perubahan data pelaksanaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2022 yakni adanya pengusulan nama-nama petani ke dalam E-RDKK, pencetakan kartu tani (ATM) dan penebusan pupuk bersubsidi. Sehubungan dengan adanya sarana dan prasarana sebagai penunjang kebijakan program kartu tani di Kelompok Tani Sedyo Utomo Padukuhan Widoro Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon.

Petugas penginputan data petani dalam sistem masih minim pada tingkatan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kapanewon Sewon sedangkan sarana prasarana sudah mencukupi. Sedangkan pada tingkatan Kios Pupuk Lengkap (KPL) hanya terdapat satu petugas yang khusus dalam pelayanan penebusan pupuk yang menggunakan kartu tani melalui alat mesin EDC (Elektronik Data Capture) yang digunakan untuk melayani petani bagi masyarakat di Kalurahan Bangunharjo.

Hasil penelitian di lapangan dalam hal kategori pupuk bersubsidi untuk pertanian yang di tebus oleh kelompok tani Sedyo Utomo Padukuhan widoro di KPL sarana Tani ada pupuk Urea, pupuk NPK Ponska, dan pupuk organik. Pejabat Daerah telah menentukan HET (Harga Eceran Tertinggi dan harga pupuk sudah sesuai. Masih ada cara pandang yang berbeda antara Petani, Pemerintah maupun dari Penyuluh Pertanian terkait penentuan jumlah kuota kebutuhan pupuk yang terdapat pada kartu tani walaupun kebutuhan alokasi pupuk sudah disesuaikan oleh Harga Eceran Tertinggi. Kuota yang tersedia sesuai kebijakan pemerintah belumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan pertanian yang ada di kelompok tani Sedyo Utomo Padukuhan Widoro khususnya ketersediaan pupuk NPK Ponska di akhir masa tanam ketiga yang dikarenakan ada pengurangan batas jumlah kuota yang tidak mencapai 100%.

### **Perilaku Hubungan Antar Organisasi**

#### **a. Komitmen**

Penemuan sesuai yang ada tentang adanya kesepakatan yakni hubungan konkrit yang telah diberikan dari instansi pemerintah yaitu Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kapanewon Sewon dalam menjalankan implementasi kebijakan program kartu tani di setiap kelompok tani. Bentuk komitmen dari Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kapanewon Sewon yaitu adanya pertemuan kelompok tani kalurahan yang tergabung di dalam Gapoktan Kalurahan Bangunharjo dan dalam menggunakan bermacam teknologi terkini secara update baik cetak maupun elektronik sesuai dengan perkembangan yang ada di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kapanewon Sewon. Komunikasi yang baik dan membantu dalam hal edukasi dengan cara sosialisasi yang telah dilakukan oleh Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kapanewon Sewon kepada kelompok tani di tingkat bawah khususnya yang ada di Padukuhan Widoro Kalurahan Bangunharjo kapanewon Sewon.

#### **b. Koordinasi**

Penerapan dalam implementasi kebijakan untuk menyalurkan pupuk program kartu tani di kelompok tani Sedyo Utomo Padukuhan Widoro Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon bekerjasama menggandeng koordinator penyuluh Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kapanewon Sewon, petugas Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Kepek, Dukuh Widoro dan Pengurus tani yang ada di Padukuhan Widoro. Bentuk koordinasi dari kelompok tani dalam pertemuan kelompok tani dilakukan sebuah tanya jawab yang membangun sehingga petani merasakan terbantu dengan adanya pertemuan tersebut. Sementara itu, pengurus kelompok tani selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Dukuh Widoro dalam pendataan petani yang akan dimasukkan dalam E-RDCK Padukuhan Widoro serta dalam hal penebusan pupuk yang digunakan oleh petani.

### **Prilaku Birokrasi Tingkat Bawah**

Definisi dari perilaku birokrasi tingkat bawah adalah bahwa adanya kemampuan dari berbagai pihak atau instansi kelompok tertentu dalam melaksanakan program kartu tani di Kelompok Tani Sedyo Utomo yang diluar kewenangan formal (*dikresi*). Instansi yang dimaksud yakni Balai penyulu Pertanian (BPP) Kapanewon Sewon, Penyuluh pertanian lapangan (PPL) Kalurahan Bangunharjo, dan Petugas Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Kepek. Hasil dari penelitian diperoleh bahwa Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kapanewon Sewon sudah baik dalam menjalankan implementasi kebijakan program kartu tani secara

*diskresi*. Secara garis besar bisa dikatakan seperti itu karena berdasarkan pada telaah yang dilakukan dengan pendekatan cara komunikasi secara personal dengan banyak petani, dan juga selalu menggandeng serta mengajak pihak lain yang mempunyai kepentingan dan kewenangan misalnya melibatkan Penyuluh Pendamping Lapangan, Kios Pupuk Lengkap, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Penyaluran fisik kartu tani di Padukuhan Widoro kepada petani merupakan bentuk diskresi yang telah dilakukan oleh Penyuluh pertanian di binaan Kalurahan Bangunharjo yang mana hal tersebut sebenarnya adalah tugasnya dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kepek selaku pihak yang mencetak kartu tani bagi petani. Disisi lain PPL juga telah bekerjasama dengan menghadiri pertemuan dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan pertanian pada pertemuan yang dilaksanakan oleh ketua kelompok tani se-kalurahan dan pemerintah kalurahan. Di samping itu pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang kepek juga telah melakukan yang namanya *diskresi* dengan langkah berkomunikasi secara tatap muka.

### **Perilaku Kelompok Sasaran**

Hasil temuan penelitian di Kelompok Tani Sedyo Utomo di Padukuhan Widoro Kalurahan Bangunharjo pada implementasi kebijakan program kartu tani dari perwakilan pengurus kelompok dalam hal ini yaitu ketua Kelompok Tani Sedyo Utomo, Petugas kios pupuk lengkap (KPL), para warga yang masuk dalam E-RDCK kelompok tani. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara individu petani merespon positif dan ada juga yg respon negatif dengan adanya penebusan pupuk menggunakan program kartu tani yang dikelola oleh kelompok tani Sedyo Utomo. Akan tetapi dari petani di Padukuhan Widoro sebagian banyak merespon baik yang mana pemikirannya bahwa dalam menggunakan Kartu Tani yang dikelola kelompok dapat kemudahan bagi petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi dengan akses transportasi begitu dekat, bisa terjangkau harganya, dimudahkan karena petani tinggal menebus di kelompok tanpa harus melakukan transaksi ke Bank Bri dan ke Kios pupuk serta Kelompok Tani sedyo Utomo masih bisa hidup dalam artian mempunyai uang Kas kelompok yang sewaktu-waktu akan digunakan untuk kegiatan petani di Padukuhan widoro dengan mengelola uang pupuk petani. Disamping itu, respon kurang baik atau negatif ditunjukkan oleh petani di Padukuhan Widoro hanya sebagian sedikit dikarenakan ada kendala kekurangan ketersediaan jumlah pupuk bersubsidi NPK Ponska di

akhir masa tanam ketiga dengan adanya pengurangan kuota yang tidak mencapai 100% penebusan.

### **Faktor Pendukung**

Semua Komponen Masyarakat dan Dinas yang mumpuni dan mempunyai ilmu yang sesuai dengan bidangnya menjadikan salah satu faktor yang menjadi pendukung dari kebijakan program kartu tani, Sumber Daya Manusia yang dimaksud adalah BPP (Balai Penyuluh Pertanian) Kapanewon Sewon, dan Koordinator penyuluh bidang pertanian Kalurahan Bangunharjo, penganggaran yang baik dari daerah maupun pusat yang begitu memadai, adanya keterlibatan yang sangat aktif gampang di ajak kerjasama dari pengurus tani yang diwakili Ketua Gapoktan sedyo Utomo dan juga warga tani dalam mengolah dan menyusun E-RDCK, juga fasilitas yang dilakukan oleh perangkat desa secara baik dalam hal ini Dukuh di Padukuhan Widoro.

### **Faktor Penghambat**

Adapun kendala-kendala menjalankan implementasi kebijakan penyaluran program Kartu Tani di Kelompok Tani Sedyo Utomo Padukuhan Widoro Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupeten Bantul adalah tidak mempunyai transportasi sendiri untuk mengangkut pupuk yang sudah ditebus dari KPL Sarana Tani dan dikarenakan jauhnya lokasi penebusan pupuk sehingga membengkaknya biaya transportasi bagi kelompok Tani Sedyo Utomo yang jarak lokasi dengan kios lumayan jauh membuat Kelompok membayar ongkos transportasi yang dibebankan kepada petani, penghambat lainnya yakni pengolahan proses memvalidasi data petani melalui tahapan verifikasi data E-RDCK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) disebabkan pergantian data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok petani berhubungan pada perbedaan luas lahan penggarap sawah, perbaharuan jumlah lahan garap yang ada, adanya pergantian nama pemilik ATM Kartu Tani dikarenakan pindah penduduk, petani yang sudah meninggal dunia, adanya perubahan jenis tanaman yang ditanam. Perubahan-perubahan yang ada tersebut tidak ada laporan ke pengurus Kelompok Tani Sedyo Utomo sehingga tidak bisa terlacak, Pengurusan Kartu Tani yang Hilang dan juga pengurusan kartu yang masih bermasalah karena tidak bisa digesek untuk penebusan. Disamping itu dalam menyusun dan menginput E-RDCK anggota kelompok tani masih ada kendala yang terletak pada kesesuaian yang dibutuhkan oleh warga petani dilihat dari lahan garap dan jenis tanaman, masih ada juga beberapa anggota petani

yang tidak mendaftarkan diri ke kelompok tani Sedyo Utomo petani yang memiliki lahan di Padukuhan Widoro akibatnya petani tersebut belum bisa mendapatkan kartu tani. Masalah yang muncul dan ini terjadi di kios pupuk lengkap (KPL) Sarana Tani Kalurahan Bangunharjo yaitu ketersediaan pupuk NPK di akhir masa tanam ketiga yang berkurang sehingga petani kesulitan dalam menebus.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Penerapan Kebijakan Program Kartu Tani ini adalah salah satu bagian dari kebijakan sosial. Implementasi program kartu tani dengan sistem penggunaan teknologi terkini yakni kartu dalam bentuk ATM atau kartu sebagai alat untuk melakukan transaksi memperoleh pupuk bersubsidi yang hanya bisa diakses menggunakan mesin EDC (Elektronik data Capture) melalui program Kartu Tani di Padukuhan Widoro Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon merupakan kebijakan yang menjadikan petani menjadi mudah dalam mengakses pupuk dan kemudahan pemerintah dalam melakukan penyaluran pupuk subsidi bagi petani. Penemuan sesuai hasil penelitian di lapangan, bahwa petani dalam mengimplementasikan kebijakan dalam penebusan menggunakan Kartu Tani di Padukuhan Widoro Kalurahan Bangunharjo kapanewon Sewon sudah berjalan dengan baik dan teknis penebusan pupuk bersubsidi dilakukan secara kolektif oleh Kelompok Tani Sedyo Utomo serta sudah sesuai aturan regulasi yang sudah ada, akan tetapi ada beberapa hal yang masih belum bisa berjalan dengan maksimal. Penggunaan model teori Soren C. Winter bisa dilihat masing-masing petani saling berhubungan yang satu sama lain saling mempunyai keterikatan yang baik dalam kebiasaan antar organisasi yang merupakan bentuk kesanggupan dan selalu melakukan komunikasi serta koordinasi untuk menjalankan implementasi kebijakan program kartu tani tentang penebusan menggunakan ATM kartu tani. Adapun selain hal tersebut, adanya suatu kebiasaan aturan di tingkat bawah yang mana kelompok tani merupakan kelompok yang berperan langsung dalam menjalankan tugasnya di lingkup masyarakat dengan implementasi kebijakan yang sudah dibuat. Ada juga bahwa melalui suatu perilaku petani yang merupakan target yang sangat mudah bisa dilihat, adanya respon baik (positif) dan adanya respon yang kurang baik (negatif) dengan adanya dari kebijakan dan masyarakat itu sendiri secara langsung yang terkait dengan adanya kebijakan implementasi program kartu tani yang ditangani dan dikelola oleh kelompok tani sedyo Utomo. Faktor pendukungnya yaitu peran aktif BPP Kapanewon Sewon yang selalu memberikan informasi yang cepat dan komunikasi yang baik, kemudahan dalam

menyelesaikan permasalahan kartu tani yang difasilitasi oleh Bank BRI Cabang Kepek, Pengurus Kelompok Tani yang Aktif dan mumpuni untuk menjalankan tugasnya, Dukuh yang selalu mendukung program kelompok tani Sedyo Utomo, peran aktif dari semua petani yang ada. Sementara ada sisi lain, dengan hambatan berupa transportasi kelompok tani belum ada, keterbatasan biaya dan jarak rumah lokasi karena jauh dari tempat penyedia atau kios pupuk lengkap (KPL), Beban Transportasi penebusan pupuk dibebankan kepada petani, banyak petani yang sudah lansia.

Adanya semangat kelompok tani Sedyo Utomo dalam membantu semua petani yang ada di Padukuhan Widoro untuk menyediakan kebutuhan pupuk secara kolektif diharapkan mampu didukung dan dipermudah oleh pemangku kebijakan dikarenakan dengan sistem penebusan kolektif mampu memberikan kontribusi perkembangan kelompok tani sehingga ada kegiatan yang mana uang pemasukan akan kembali lagi untuk kegiatan petani itu sendiri. Pemerintah hadir dalam program kartu tani ini juga harus melihat realitas di bawah karena kemampuan petani satu dengan yang lain berbeda-beda.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anderson, J. (2012). *Public Policy Making, second end, New York : Holt , Renhart and Winston*. AR.
- Dahiri. (2018). Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan dan Pemberdayaan Desa Melalui Program Padat Karya Tunai di Desa (PKTD). *Buletin APBN*, 3 (14): 3–8.
- Gunawan, I. (2016). *Metode penelitian Kualitatif: Teori dan Publik*. PT. Bumi Aksara.
- Hariani, D., & Ashari, M. L. (2019). *Analisis efektivitas program kartu tani di Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Journal of Public Policy and Management Review*. J. of public and management review.
- III, G. C. E. (1980). *Implementing Public Policy*. Cogressional Quaerterly Inc.
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Service*. Russell Sage Foundation.
- Merile, S., & Grindle. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.
- Meter, V., Donal, & Horn, C. E. Van. (1975). *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work. Adminitration and Society*.
- Mulyadi, D. (2016). *Administrasi Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Mulyasa, E. (2013). *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Cakra Books.
- Nurdin Usman. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo.

## **Journal of Indonesian Rural and Regional Government**

Vol. 6 No. 1 (2022) I E-ISSN: 2829-0798 P-ISSN: 2580-9342 Hal: 39-57

- Prabawati, & Mufidah, N. (2018). *Implementasi program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Desa Durung Bedug, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo*.
- S C Winter. (2003). *Implementation Perspective: Status and Reconsideration*. Dalam *Handbook of Public Administration*. Sage Publication Ltd.
- Sajogyo. (1999). *Sosiologi Pedesaan*. Gadjah Mada University Press.
- Sujito, A. (2013). *Kontek dan Arah pembaharuan Desa Dalam Advokasi RUU Desa*. Jurnal Mandatory IRE.
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Pustaka Indonesia Press.